

BAB II

Modernisasi dan Perkembangan Ekonomi Politik Jepang Setelah Perang Dunia II

Jepang memiliki sejarah yang panjang dalam perjalanannya membangun kekuatan ekonomi. Untuk mendukung reformasi ekonomi Jepang yang runtuh akibat Perang Dunia II Jepang terus berusaha untuk memperkuat identitas politik, sosial, dan budayanya dengan negara-negara lain. Hingga sampai menjadi negara super power, Jepang sempat menjalankan politik isolasionis di Era Tokugawa, melakukan modernisasi di Era Meiji memilah sistem mana yang ideal untuk membawa perubahan signifikan kepada Jepang. Didalam bab ini penulis akan menjabarkan bagaimana proses tersebut berjalan di Jepang.

A. Proses Modernisasi Negara Jepang pada Era Meiji

Sistem isolasionis pada Era Tokugawa ternyata tidak memberikan dampak yang baik bagi Jepang. Tertutupnya Jepang kepada dunia luar kenyataannya menghambat negaranya dalam mengikuti tuntutan global yang terus berinovasi dan berlomba untuk menguatkan perekonomiannya masing-masing. Sehingga pada Era Meiji mulai dilakukan sebuah gerakan modernisasi, hingga muncul perubahan-perubahan baru setelah Perang Dunia II. Dalam Modernisasi yang dilalui oleh Jepang, terdapat beberapa hal baru yang mulai muncul, namun modernisasi Jepang itu tidak datang dengan sendirinya, melainkan ada sebuah hal yang melatar belakangi. Sebelum membahas mengenai modernisasi negara Jepang, penulis akan memaparkan bagaimana modernisasi tersebut dapat terjadi. Terdapat tiga bagian yang terpisah pada pembahasan ini, yaitu latar belakang terjadinya proses modernisasi Jepang, pelaksanaan modernisasi Jepang (Restorasi Meiji), sekaligus dampak modernisasi Jepang pasca Meiji.

1. Latar Belakang Modernisasi Jepang

Selama kurang lebih 250 tahun kekuasaan Shogunat Tokugawa mengisolasi interaksinya dengan bangsa-bangsa lain. Hanya kepulauan Okinawa pada saat itu yang mendapat izin melakukan interaksi dengan dunia luar namun dengan akses yang masih dibatasi oleh Tokugawa. Selama berjalannya sistem isolasionis masyarakat Jepang dilarang melakukan perjalanan ke Luar Negeri dan melakukan hubungan dagang dengan negara luar. Jika hal itu terjadi, maka individu yang berkaitan dilarang kembali ke Jepang. Peraturan tersebut dibuat oleh Tokugawa, karena banyak hal yang muncul dan dinilai bertolak belakang dengan feodal yang dianut rakyat Jepang pada saat itu.¹

Namun di belahan dunia lain, dunia barat mulai membuat inovasi-inovasi baru mengenai pembangunan teknologi yang menghasilkan kapal bertenaga uap. Sehingga aktivitas perdagangan antar negara mulai bermunculan. Hingga Amerika memiliki hubungan perdagangan dengan China. Begitupun dengan negara-negara lain yang mulai aktif melakukan transaksi perdagangan. Pada saat itu, politik isolasi dirasa tidak dapat dipertahankan lagi, karena terjadinya pergeseran dan kemunculan berbagai inovasi yang dilakukan negara Barat, yangmana Jepang yang

¹Widarahesty, Yusi. Ayu, Rindu. 2011. *“Pengaruh Politik Isolasi (Sakoku) Jepang Terhadap Nasionalisme Bangsa Jepang, Studi Tentang Politik Jepang dari Zaman Edo (Feodal) Sampai Perang Dunia II”*, Jurnal AL-AZHAR Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol 1, No 1

tadinya terletak diluar alur lalu-lintas internasional, sekarang menjadi daerah lalu-lintas kapal.²

Datangnya Komodor Perry seorang pelaut asal Amerika pada 1853 dan Townsen Haris pada tahun 1858 memaksa Tokugawa untuk menandatangani perjanjian dagang pertama kali yang menyebabkan kekhawatiran bagi rakyat Jepang. Tokugawa dianggap tidak mampu melindungi Jepang dari negara-negara Barat. Mereka khawatir dengan adanya penandatanganan perjanjian tersebut, mengakibatkan dikuasainya negara Jepang oleh negara-negara Eropa. Mereka beranggapan bahwa hal tersebut dapat terjadi karena Tokugawa tidak memenuhi fungsinya sebagai Shogun. Maka dari itu, hal tersebut digunakan oleh beberapa daimyo yang berani melawan kekuasaan Tokugawa untuk menjatuhkannya. Hingga pada tahun 1868 kekuasaan Tokugawa dikalahkan oleh kekuatan Choshu, Satsuma, dan dibantu oleh para daimyo lainnya.³

Akhirnya pada tahun 1868, kekuasaan Tokugawa dinyatakan runtuh. Setelah beberapa tahun kemudian tepatnya 1869, Tenno pindah dari Kyoto ke Edo yang kemudian nama tersebut diganti menjadi Tokyo. Pada saat itu, yang dimaksud sebagai Tenno Heika adalah Mutsuhito yang kemudian diberi nama Meiji Tenno. Oleh sebab itu, gerakan perubahan yang muncul pada tahun 1868 diberi nama gerakan *Restorasi Miji*.

² Suryohadiprojo, Sayidiman. 1987. *“Belajar dari Jepang Manusia dan Masyarakat Jepang dalam Perjuangan Hdup”*. JAKARTA-UIPRESS

³ Ibid,

2. Pelaksanaan Restorasi Meiji

1868 merupakan tahun dimulainya Zaman Meiji. Ditandai dengan runtuhnya kekuasaan Tokugawa dan dilanjutkan dengan perubahan nama ibu kota yang semula bernama Edo menjadi Tokyo, sekaligus pemindahan ibu kota yang tadinya terletak di Kyoto sekarang menjadi di Tokyo, hal tersebut sebagai penanda telah berdirinya rezim baru.⁴

Restorasi Meiji merupakan suatu gerakan modernisasi atau gerakan perubahan yang dilalui oleh negara Jepang. Di mana langkah awal dari pemerintah baru ini adalah pengambilan alih atas nama istana seluruh tanah dan rakyat yang pada saat itu berada dibawah kekuasaan para daimyo. Satu langkah penting yang lain ialah penghapusan sistem pangkat feodal, perbedaan kasta antara samurai, petani, tukang dan pedagang.⁵ Pada bidang urusan luar negeri pun mengalami perubahan yang signifikan. Setelah pembentukan pemerintahan yang baru, negara Jepang mulai membuka diri sekaligus menjalin hubungan persahabatan dengan negara-negara lain. Pada saat itu, Jepang membuka hubungan dagang dengan Korea dan Cina. Namun, seiring berjalannya waktu interaksi Jepang mulai merambah ke beberapa negara lain dan Jepang mulai aktif membangun kerjasama. Di samping

⁴ Puspawati, Dyah Sinta. 2013. (SKRIPSI) "*Restorasi Meiji : Awal Kebangkitan Negara Jepang*" diakses di http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=61777&cobyek_id=4 pada 9 Desember 2018

⁵ Sakamoto, Taro. 1980. "*Jepang Dulu dan Sekarang*", Gajah Mada University Press

itu, terbukanya interaksi dengan dunia luar otomatis memicu masuknya orang asing ke Jepang. Ketika proses modernisasi di Jepang mulai dijalankan, terdapat suatu keterbatasan mengenai warga negara asing yang datang. Di mana saat itu Jepang yang terkenal dengan feodalnya sedang berusaha dengan keras untuk mengangkat dirinya ke taraf yang sama dengan negara-negara modern yang lain.

Terdapat beberapa langkah yang ditempuh oleh Jepang dalam upaya untuk membangun negaranya menjadi negara yang lebih terbuka, salah satunya yaitu dengan *Westernisasi*. *Westernisasi* sendiri merupakan sebuah proses ketika masyarakat berada dalam pengaruh atau mengadopsi budaya Barat dalam berbagai bidang.⁶ *Westernisasi* dipandang sebagai suatu bentuk yang dapat membantu Jepang untuk mulai melakukan proses modernisasi. Dengan adanya *westernisasi*, tidak dipungkiri bahwa terdapat adanya suatu hal baru bahkan budaya-budaya baru yang mulai masuk di Jepang. Namun, dengan adanya *westernisasi* bangsa Jepang tidak khawatir akan hilangnya identitas negara mereka, karena proses *westernisasi* tersebut dimaknai oleh Jepang hanya sebuah batu loncatan yang diadopsi untuk membantu memulihkan kekuatan negaranya, yang disebabkan oleh latar belakang politik isolasi terdahulu.

Dalam proses pemberbaruan, Jepang berdiri dengan menggunakan semboyan "*Fukoku*

⁶Balur, Kantrianus. 2018. "Westernisasi Mengubah Kebudayaan Bangsa Indonesia" diakses di <https://www.kompasiana.com/kantrianusbalur6344/5b791d1baeebe179254ee876/westernisasi-mengubah-kebudayaan-bangsa-indonesia> pada 15 Desember 2018

Kyohei” yang berarti negara sejahtera dan memiliki tentara yang kuat. Untuk merealisasikan semboyan tersebut, terdapat beberapa langkah yang ditempuh oleh bangsa Jepang untuk mempermudah perkembangan Jepang dimasa yang akan datang. langkah *pertama* adalah penghapusan golongan samurai, sekaligus kesetaraan kedudukan antara golongan petani, tukang, hingga pedagang. *Kedua* yaitu diadakannya pendidikan wajib dan bebas bagi seluruh rakyat, untuk menunjang partisipasi rakyat dengan berbekal pendidikan. *Ketiga* sikap Jepang yang berorientasi pada kekuatan sendiri, daripada mengandalkan bantuan asing. *Keempat*, adanya wajib militer untuk bangsa Jepang tanpa terkecuali. *Kelima*, adanya perubahan sistem pajak⁷ Dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi mengakibatkan suatu dampak yang signifikan untuk perkembangan perekonomian bangsa Jepang yang akan datang.

3. Dampak Modernisasi Jepang Pasca Restorasi Meiji

Adanya beberapa proses pemberbaharuan yang dilakukan oleh Pemerintah Jepang pada proses Meiji, berdampak pula pada perjalanan Jepang dikemudian hari. Di mana proses Meiji tersebut membuat Jepang menjadi negara yang kemudian terbuka dan mulai melakukan perjanjian hubungan kerjasama dengan negara luar. Dengan begitu, tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut mengakibatkan semakin bertambahnya warga negara asing yang berkunjung ke Jepang. Pada proses Restorasi Meiji terdapat juga budaya asing yang mulai masuk, seperti penerapan

⁷ Op,cit. Suryohadiprojo, Sayidiman

westernisasi yang dilakukan oleh Jepang. Pada saat itu pula Jepang melakukan sebuah perubahan kebijakan yang semula isolasionis menjadi kebijakan *Open Door Policy*, atas tuntutan global yang memang memaksa negara tersebut untuk membuka diri, agar dapat setara dengan negara-negara modern lainnya. Namun keadaan perekonomian Jepang berubah kembali ketika pasca Perang Dunia II yang dilalui oleh Jepang.

B. Ekonomi Politik Jepang setelah Perang Dunia II dan Pengaruh doktrin Yoshida dan Fukuda pada Kebijakan Luar Negeri Jepang

Kekalahan Jepang pada Perang Dunia II mampu merubah orientasi Jepang. Setelah kealahannya, Jepang mulai berfikir bagaimana cara untuk membangun negaranya yang hancur tanpa mengusik kekuasaan Barat. Akhirnya Jepang memutuskan untuk mulai bangkit dengan melakukan perbaikan ekonomi. Proses ini mendorong Jepang menjadi lebih banyak membangun interaksi dengan negara lain. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai keadaan ekonomi politik Jepang setelah Perang Dunia II dan pengaruh dua doktrin pada Kebijakan Luar Negeri Jepang.

Keadaan negara Jepang pun berubah kembali ketika kealahannya menghadapi Perang Dunia II. Pada saat itu, Jepang terpaksa harus tunduk pada negara yang berkuasa, yaitu Amerika Serikat. Dengan begitu Jepang mencari sebuah cara untuk membangun negaranya kembali tanpa harus mengusik negara Barat. Dengan lebih memperhatikan aspek industri dan ekonominya dibandingkan dalam aspek militer, kemudian pada era 1950an perekonomian Jepang pun mengalami peningkatan yang signifikan. Setelah lebih dari 10 tahun, pertumbuhan

di Jepang meningkat kurang lebih 10% per tahun.⁸ Seiring berjalannya waktu, industri Jepang mulai menunjukkan kenaikan yang fluktuatif terutama setelah terjadinya Perang Dunia II, Jepang tidak hanya menghasilkan barang industri dengan jumlah banyak saja, namun juga menjamin kualitas barangnya. Ada beberapa keberhasilan Jepang yang menonjol dalam perkembangan industrialisasi, yaitu berhasilnya strategi yang dijalankan Jepang dalam menghubungkan produksi dengan perdagangan dan terjalannya kerjasama intens antar pemerintah dan pengusaha.

Setelah semakin berkembangnya industri di Jepang, hal tersebut membuat Jepang menjadi negara yang setara dengan Amerika Serikat. Lambat laun, mengenai proses meningkatkan ekonomi domestik, Jepang pun mulai melirik untuk mengembangkan ekonomi kreatifnya pada bidang pariwisata, dimana pariwisata tersebut dijadikan suatu alternative oleh Jepang ketika industri-industri dari negara lain mulai berkembang. Hingga Jepang mulai tergelak dan memperbaiki perusahaan kereta api sebagai sarana atau sistem angkutan domestiknya. Tidak hanya itu, Jepang juga mulai memperbaiki sarana umum seperti hotel, transportasi, komunikasi dan lain-lain. Dengan begitu kegiatan wisata dalam negeri pun mengalami peningkatan, hingga mampu memberikan sumbangsih kepada ekonomi Jepang melalui kesejahteraan masyarakatnya. Pada saat itu, sektor pariwisata telah diperhatikan keberadaannya, meskipun belum dalam kancah internasional.⁹

⁸ Suherman, Eman. 2004. "Dinamika Masyarakat Jepang dari Masa Edo Hingga Pascaperang Dunia II", Juni Humaniora, Vol 16, No 2

⁹ Ibid,

Jika dipandang dari sudut ketahanan nasional, sistem ekonomi Jepang menunjukkan ketahanan ekonomi yang kuat. Hal tersebut disebabkan oleh ketekunan Jepang yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonominya saja, namun juga memperhatikan kestabilan yang ada pada masyarakatnya. Selain itu, dalam pembangunan ekonomi domestik, Jepang tidak mudah dipenetrasi atau ditembus oleh bangsa asing. Justru Jepang sendiri lebih memperlihatkan keagresifannya dalam memasarkan produknya ke luar negeri. Hal itu disebabkan karena penanaman sifat yang dilakukan pada restorasi meiji bahwa Jepang memiliki sifat kompetitif. Di samping itu, muncul juga adanya doktrin pada politik luar negeri Jepang. doktrin tersebut adalah Yoshida dan Fukuda.

1. Yoshida Doctrine

Kekalahan pasca Perang Dunia II mengakibatkan kehancuran bagi negara Jepang. Setelah kekalahan tersebut, Perdana Menteri Yoshida Shigeru muncul dengan menerapkan pemberbaharuan kebijakan luar negeri Jepang dengan mengarah pada diplomasi *low profile* yang mengedepankan ekonominya. Bentuk diplomasi ekonomi tersebut dibuat sebagai upaya pemulihan Jepang pasca Perang Dunia II.¹⁰ Diplomasi ekonomi menjadi bentuk *peaceful expansion* dari ekonomi pasar luar negeri Jepang. Karena kekalahannya pada Perang Dunia II, negara Jepang pun dikendalikan oleh kekuatan sekutu pada saat itu. Dengan keadaan tersebut, Jepang diharuskan menghadapi kewajibannya

¹⁰“*Yoshida Doctrine, Japan Module-Japan PITT- University of Pittsburgh*” diakses di <https://www.japanpitt.pitt.edu/glossary/yoshida-doctrine> pada 5 Februari 2019

untuk melakukan reparasi perang, di mana Jepang diperbolehkan untuk mengembangkan industri domestiknya namun dilarang untuk memperkuat kekuatan perang, maka dimunculkanlah doktrin yoshida tersebut. 1957, merupakan tahun dimana kebijakan itu dilaksanakan.

Tujuan utama dari doktrin Yoshida adalah pemfokusan Jepang dalam pembangunan ekonomi yang hancur setelah Perang Dunia II dengan dilanjutkan penyerahan pertahanan militer kepada AS.¹¹ Pada periode itu pula, terdapat adanya suatu keterkaitan mengenai kebijakan reparasi perang, kepentingan ekonomi, dan strategi perang dingin Amerika Serikat dengan politik luar negeri Jepang terhadap negara-negara Asia Tenggara yang disebabkan salah satunya karena kesulitan Jepang untuk menggantungkan pasar produksinya pada China. Pada keadaan yoshida doctrine, Jepang dituntut untuk mendukung organisasi regional di kawasan yang telah muncul, dengan begitu digantikanlah doktrin yoshida menjadi fukuda doctrine sebagai perubahan orientasi Jepang yang mengarah pada negara-negara Asia Tenggara.

2. Fukuda Doctrine

Kemunculan doktrin fukuda pada tahun 1974, menjadi sebuah penanda baru dalam hubungan kerjasama antara Jepang dengan negara-negara Asia Tenggara. pada saat itu, Perdana Menteri Takeo Fukuda menyampaikan pidatonya yang berisi mengenai

¹¹ Putri Purbantina, Adiasari. 2013. *"Dari Yoshida Doctrine ke Fukuda Doctrine: Politik Luar Negeri Jepang di Asia Tenggara Pasca-Perang Dunia II"*, Global & Policy Vol 1, No.1

penetapan prinsip baru yang akan memandu kebijakan Jepang dalam orientasinya yang condong ke Asia Tenggara. Pidato tersebut ialah, 1.) Adanya komitmen perdamaian, dan penolakan penggunaan kekuatan militer, 2.) Jepang akan melakukan yang terbaik untuk terjalinnya hubungan yang berdasar saling percaya dengan negara-negara Asia Tenggara, 3.) Jepang akan bekerjasama secara positif dengan negara-negara Asia Tenggara.¹²

Tahun 1970, menjadi tahun kebangkitan bagi Jepang. Pada tahun tersebut, Jepang muncul sebagai pemeran utama dalam ekonomi global. Datangnya PM Jepang, Kakue Tanaka tahun 1974 ke Asia Tenggara, menuai respon negative. Bahkan kedatangannya berakibat pada munculnya gerakan protes anti Jepang yang dikenal dengan Peristiwa Malari di Indonesia dan Thailand. Gerakan tersebut diarahkan pada perusahaan multinasional atau MNC. Negara-negara Asia Tenggara pun khawatir jika perusahaan tersebut lebih mendominasi dan dapat mengambil alih pasar lokal mereka. Namun, Jepang dapat menepis dan meredakan gerakan protes tersebut dengan memanfaatkan suatu bentuk bantuan kepada negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia (penerima bantuan terbesar dari Jepang). Dengan adanya doktrin Fukuda, memberikan kerangka sistematis bagi arah politik Jepang, adanya doktrin tersebut juga berdampak pada hubungan Jepang dengan negara ASEAN termasuk Indonesia yang aktif

¹²Miguel de Emilio. 2014. "*Japan and Southeast Asia: From the Fukuda Doctrine to Abe's five principles*" Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) diakses di <https://revistas.ucm.es/index.php/UNIS/article/viewFile/44792/42219> pada 5 Februari 2019

dalam hubungannya tidak hanya dalam bidang ekonomi, politik saja, namun juga mengenai pertukaran budaya.¹³

3. Perkembangan Pariwisata Negara Jepang

Setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia II, berakibat pada pemutusan Jepang untuk tidak lagi menggunakan kekuatan militer sebagai cara menjalin hubungan dengan negara lain. Dengan beralihnya hubungan Jepang pada *soft diplomacy*, keadaan tersebut memunculkan suatu ekonomi kreatif yang diinisiasi oleh Jepang untuk membantu membangun sektor ekonomi domestiknya selain sektor industri. Ekonomi kreatif tersebut adalah sektor pariwisata. Pariwisata merupakan satu dari berbagai sektor yang dinilai dapat membantu menopang perekonomian suatu negara. Dengan adanya sektor ini, dirasa dapat menyumbangkan pendapatan perkapita selain dari sektor industri yang telah lama dikembangkan oleh Jepang. Dalam membicarakan mengenai perkembangan ekonomi kreatif, terdapat tiga fase yang dilalui Jepang. Pada bagian ini, penulis akan memaparkan fase-fase tersebut.

a. Dorongan dari Pemerintah Jepang untuk Mulai Melakukan Perjalanan Wisata

Setelah Perang Dunia II, keadaan pariwisata Jepang pada saat itu, dapat dikatakan masih sangat memprihatinkan. Sektor pariwisata domestik Jepang pun tidak berjalan dengan baik.¹⁴

¹³ Op,cit .Putri Purbantina, Adiasari

¹⁴Carlie, E Leonny. 1996. “*Economic Development and the Evolution of Japanese Overseas Tourism, 1964-1994*” Tourism Reaction Research Vol 21, No 1

Namun lambat laun, pemerintah Jepang mulai melirik untuk mengembangkan industri pariwisata tersebut. Jepang pun mulai memperbaiki sarana dan fasilitas umum, seperti alat transportasi yang dapat menghubungkan pada perwilayahan negara tersebut. Selain itu, adanya sebuah perbaikan kelayakan akan penginapan seperti hotel, *home stay* dan membangun kenyamanan restoran disana. Kemudian adanya himbauan dari pemerintah Jepang untuk seluruh warga negara Jepang agar mulai melakukan perjalanan wisata di negaranya, dengan tujuan untuk mengaktifkan sektor pariwisata yang ada di Jepang. Pemerintah pun melakukan berbagai cara dengan mewajibkan sekolah-sekolah yang ada di Jepang untuk satu tahun sekali melakukan perjalanan wisata. Wisata yang ditekankan pada saat itu adalah wisata edukasi. Para siswa pun diajak untuk berkunjung ke tempat bersejarah yang ada di Jepang seperti Kyoto, disana mereka akan diberikakan berbagai pandangan akan sejarah Jepang di masa lampau.

b. Outbound Tourism Negara Jepang

Pariwisata negara Jepang, sebenarnya sudah berlangsung sejak pertamakali Jepang membuka negaranya untuk mulai berhubungan dengan negara luar. Dengan terbukanya negaratersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa warga negara asing mulai berdatangan kesana, hanya saja dengan keterbatasan tujuan. Pariwisata dinilai sebagai suatu alternative bagi Jepang untuk menambah pendapatan ekonomi selain ketergantungannya pada sektor industri. Di samping itu, ada keterkaitannya dengan pasca Perang Dunia II,

dimana Jepang diharuskan untuk membangun perekonomian negaranya tanpa harus menggunakan militer atau *harddiplomacy*, yang salah satu cara, dengan mengembangkan perekonomiannya melalui sektor pariwisata. Jepang pun mulai memperbaiki sarana umum dinegaranya. Dengan adanya perbaikan transportasi dan perhotelan, warga negara asing pun mulai berdatangan dan tertarik untuk berwisata di negeri Sakura tersebut. Tercatat sebanyak 352.832 orang asing yang datang pada tahun 1964, lalu bertambah lagi menjadi 1.316.632 orang pada tahun 1980, hingga pada tahun 1990 menjadi 3.235.860 warga negara asing.¹⁵ Meski adanya pertambahan jumlah kunjungan, namun pada tahun 1980 hingga 1990, Negeri Sakura ini tercatat sebagai negara yang hanya aktif dalam menyumbangkan angka wisatawan ke negara lain saja (*Outbound Tourism*). Pada saat itu, kemunculan sector pariwisata Jepang belum sepenuhnya dihiraukan. Karena Jepang memandang sector industri disana masih sangat berperan dalam kemajuan perekonomian domestik jika dibanding dengan sector pariwisata.¹⁶ Namun hal tersebut berubah ketika Perdana Menteri Koizumi menerapkan suatu kebijakan baru di Jepang tahun 2002.

¹⁵JNTO Japan National Tourism Organization. “*Japan Tourism Statistic*” diakses di <https://statistics.jnto.go.jp/en/graph/#graph--inbound--travelers--transition> pada tanggal 28 Januari 2019

¹⁶ “*BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pariwisata di Jepang-ETD UGM*” (*Skripsi*) diakses di <http://etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/111474/potongan/S1-2017-335714-introduction.pdf> pada 28 Januari 2019

c. **Inbound Tourism Negara Jepang**

Perjalanan pariwisata negara Jepang semakin hari semakin menunjukkan keseriusannya untuk dikembangkan. Dengan mulai melakukan berbagai upaya untuk mengaktifkannya, hingga memunculkan *The Inbound Tourism Initiative of Japan*, sebagai sebuah kebijakan yang diinisiasi oleh Perdana Menteri Koizumi pada bulan Desember 2002, kebijakan tersebut berisi berbagai rencana mengenai sistem pariwisata Jepang. Inisiasi itu yang kemudian memberikan kemudahan bagi warga negara asing yang ingin berkunjung ke Jepang. Dalam memajukan sektor pariwisata, Jepang kemudian melakukan suatu kampanye pada tahun 2003 yaitu *Visit Japan Campaign*, namun target negara dalam kampanye tersebut masih terbatas hanya 15 negara, yaitu Korea, Taiwan, Cina, Hongkong, Thailand, Singapura, Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Jerman, Prancis, Australia, India, Russia, dan Malaysia.¹⁷ Meski terbatas, namun dengan keadaan seperti itu, menjadi suatu penanda bahwa sektor pariwisata Jepang mulai berkembang. Kebijakan *Inbound Tourism* yang dijalankan Jepang semakin hari semakin meningkat. Hingga pada pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe yang terpilih kembali menjadi Perdana Menteri Jepang tahun 2012 silam, kebijakan tersebut tetap dijalankan dengan baik, bahkan menjadi lebih baik.

¹⁷Japan Tourism Agency. 2015. "*Visit Japan Campaign (daring)*", diakses di <http://www.mlit.go.jp/kankocho/en/inbound/vjc.html> pada 29 Januari 2019

Sektor pariwisata pada Era Perdana Menteri Shinzo Abe memiliki posisi khusus dalam kebijakan Jepang pada sektor ekonomi domestiknya. Dimana kebijakan pariwisata Jepang tertuang dalam suatu agenda besar “*Abenomic Growth Strategy*”. Agenda itu terbagi menjadi tiga bagian “*Three Arrows*” (Tiga Pilar Ekonomi) yang dicetuskan oleh Perdana Menteri Shinzo Abe sebagai upayanya untuk membangun kekuatan Jepang dalam bidang ekonomi.¹⁸ Dalam merealisasikan pilar ekonomi pada kebijakan pariwisata, Jepang mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru untuk membantu mendorong pertumbuhan ekonomi domestiknya melalui kebijakan pariwisata. Kebijakan tersebut adalah kebijakan bebas visa, yang diterapkan Jepang untuk beberapa negara terpilih termasuk didalamnya adalah negara Indonesia.

Pada bab II ini, penulis memaparkan mengenai bagaimana perjalanan perekonomian Jepang yang dimulai dari pengisolasian negaranya dibawah pemerintahan Shogunat Tokugawa. Hingga akhirnya kekuasaan Tokugawa runtuh pada tahun 1868, yang kemudian digantikan dengan sebuah pemberbaharuan Jepang yang dikenal dengan Restorasi Meiji. Dimana saat berlangsungnya Restorasi Meiji, banyak sekali perubahan yang terjadi di Jepang. Pada saat itu, terdapat berbagai budaya asing yang mulai masuk ke Jepang, seperti *westernisasi* yang merupakan pengadopsian dari budaya-budaya Barat. Pada saat berlangsungnya Meiji pun Jepang

¹⁸Kantei Japan. 2016. “*Overview 1. The Basic Concept of the Growth Strategy*”, diakses di http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/en_saikou_jpn.pdf pada 23 Januari 2019

bersemboyan pada “*Fukoku Kyohei*” yang berarti negara sejahtera dan memiliki tentara kuat, dengan begitu Jepang mulai percaya pada kekuatan sendiri. Restorasi Meiji berdampak pula pada hubungan luar negeri Jepang, bawasannya Jepang yang semula adalah negara isolasi, menjadi negara yang *Open Door Policy*, dengan begitu perkembangan ekonomi yang dirintis oleh Jepang juga mengalami peningkatan. Namun, ekonomi Jepang mengalami perubahan kembali ketika kekalahannya pada Perang Dunia II. Jepang terpaksa harus tunduk pada negara yang berkuasa yaitu Amerika Serikat, selain itu Jepang juga harus melakukan reparasi perang, Jepang dapat membangun negaranya yang runtuh hanya dengan mengembangkan perekonomian tanpa harus menggunakan kekuatan militer. Pengembangan ekonomi Jepang pun tertuju pada sektor industrialisasi yang ia miliki. Namun Jepang masih berambisi mencari berbagai alternative untuk dapat menambah pemasukan ekonomi domestik selain sektor industri. Hingga tercetus suatu ekonomi kreatif dalam sektor pariwisata, kemudian Jepang mulai memperbaiki sarana umum domestiknya. Di samping itu, terdapat dua doktrin dalam kebijakan luar negeri Jepang yang ikut berperan. Yaitu Yoshida Doktrin, (yang menerapkan kebijakan luar negeri Jepang dengan mengarah pada diplomasi ekonomi), dan Fukuda Doktrine, (membahas mengenai orientasi ekonomi Jepang yang condong ke Asia Tenggara salah satunya Indonesia). Dalam bab ini dipaparkan pula mengenai perjalanan pariwisata Jepang, dari yang semula *Outbound Tourism*, menjadi *Inbound Tourism*.